

# KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR DALAM PENANGGULANGAN ILLEGAL MINING

---

 Oleh: MAHBUBAH ( 04230007 )

Government Science

Dibuat: 2008-08-05 , dengan 3 file(s).

**Keywords:** Kebijakan, Illegal Mining

Illegal mining/PETI dari hari ke-hari semakin marak dan sulit untuk diatasi, terutama pasca penertiban illegal logging pada paruh akhir tahun 2005 hingga sekarang. Kegiatan ini kalau tidak cepat tertanggulangi dipastikan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah., seperti rusaknya struktur tanah, sedimentasi sungai dan pantai serta merusak ekosistem daerah sungai dan pantai bahkan menyebabkan kerugian pada pemerintah daerah karena tidak ada pemasukan ke kas daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulunginya, baik yang bersifat regulasi (normatif), teknis dan lain-lain. Adapun permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan apa saja Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menanggulangi illegal mining dan upaya-upaya apa yang digunakan serta hambatan yang didapat dalam menanggulangi illegal mining di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menanggulangi illegal mining dan upaya-upaya apa yang digunakan serta hambatan yang didapat dalam menanggulangi illegal mining di Kabupaten Kotawaringin Timur. Lokasi penelitiannya adalah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal ini dispesifikasikan pada Pemerintah Daerah yang terkait dengan kegiatan penambangan dan lingkungan serta lokasi-lokasi penambangan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisa data peneliti menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif dari Miles dan Huberman.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa secara umum Upaya-upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan belum optimal dan menggenai di kalangan pelaku tindak kejahatan lingkungan ini. Terbukti Illegal mining masih merajalela diwilayah pesisir sungai, pantai dan daratan Kabupaten Kotawaringin Timur. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan merupakan akibat dari maraknya penambangan liar di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada dasarnya, untuk kebijakan dan undang-undang baik undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (3). Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Daerah No 20 Tahun 2000 Tentang Usaha pertambangan Umum Sudah dapat memenuhi dasar-dasar dari upaya pelaksanaan pemberantasan illegal mining di Kabupaten Kotawaringin Timur, akan tetapi hal Ini menunjukkan masih belum adanya tanda- tanda mereda praktek illegal mining. Hal ini diakibatkan adanya permainan yang rapi yang telah dilakukan para pelaku illegal mining tersebut. Dan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan untuk illegal mining masih banyak memiliki kelemahan terlihat dari sumber daya aparat yang kurang memenuhi syarat dalam upaya pelaksanaan sehingga mudah terjebak dengan tipu daya para pelaku illegal mining dengan imbalan-imbalan tertentu, koordinasi yang Kurang antara para aparat pelaksana lapangan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam penindakan serta kurangnya kerjasama antara para aparat pelaksana operasi sehingga hal-hal ini

termasuk kedalam gagalnya kebijakan yang telah dikeluarkan. dan luasnya wilayah yang menjadi sasaran pengawasan. Serta kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan operasi dilapangan maupun non lapangan, hal ini dipicu karena kurangnya anggaran dana dalam upaya pemberantasan illegal mining di Kabupaten Kotawaringin Timur serta sangat kurangnya apresiasi pihak pemerintah setempat untuk memberikan masukan yang lebih besar dalam upaya penanggulangan illegal mining dengan saling bekerja sama dan memberikan dana yang lebih besar agar pelaksanaan dapat berjalan dengan optimal.

Illegal mining/PETI increase significantly from time to time and difficult to be prevented, especially after the control of illegal logging at half past 2005 until now. If do not get prevention as soon as possible, this activity will cause the environment is damage seriously, suchas the damage of land structure, river and beach sedimentation and destroythe river and beach ecosystem even cause the financial loss at the government because there is no income. That's why, the government of Kotawaringin Timur regency through mining and energy department have done some efforts to prevent it, both of regulation, technical, etc. Moreover, the problem that will be answered in this research is related to what kind of policy of the government of Kotawaringin Timur regency in preventing illegal mining and what effort that is used and difficulty in preventing illegal mining in Kotawaringin Timur regency.

In this research, the researcher used descriptive qualitative method, the purpose of this research to describe the policy of government of Kotawaringin Timur regency in preventing illegal mining and what kind of efforts that is used and the difficulty in preventing illegal mining in Kotawaringin Timur regency, the location of the research is Kotawaringin Timur regency in this case speciallized on the governmet regency which is related to the mining activity environment and mining location in Kotawaringin Timur regency. In data collection the researcher used observation, interview and documentation technic. Meanwhile, for data analisis the researcher used qualitative analisis with interactivemodel from miles and huberman.

From this research, it can be seen that generally the prevention effort that were done is not optimal yet, it was mining ini coastal area of the river, beach and land of Kotawaringin Timur regency. The weakness of a law and control in the environment management is the effect of the increase of illegal mining in Kotawaringin Timur regency. Basically, the policy and constitution such as UUD 45 pasal pasal 33 ayat (3). Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Daerah No 20 Tahun 2000 Tentang Usaha pertambangan Umum have fullfull the basic of effort to prevent illegal mining in Kotawaringin Timur regency , but this have not show the decrease of illegal mining yet. This is caused because of the structure game between the subject of illegal mining itself. Therefore, the policy of prevention for illegal mining still had many weaknessess, it can be seen from aparatus who were less competence in the realization so that they were persuaded by the subject of illegal mining with certain repayment easily, the less of coordination between aparatus caused confusion in the action and the less cooperation between aparatus so that it can be said as the failure of policy and the wideness of area that as the target control the less of instrument in operation both in field or not this is caused because of less in fund in the prevention of illegal mining in Kotawaringin Timur regency and the less of appreciation from the government to give more attention in the prevention of illegal mining by coordination and give more fund so that the prevention will be optimal.

